

d. Kegiatan-Kegiatan berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan



Unhas Luncurkan KKN Tematik Keterbukaan Informasi Publik Pertama di Indonesia

Universitas Hasanuddin melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian dan Pembaruan Dokumen Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat fakultas dan sekolah di Aula Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMP) Unhas.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik sekaligus menjadi forum untuk memberikan pemahaman dan penguatan terhadap pengelolaan informasi publik di lingkungan Unhas. Sekretaris Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Eng. Amiruddin, menyampaikan pentingnya sinergi antara Humas dan PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Materi kegiatan mencakup klasifikasi informasi publik yang disampaikan oleh Dosen Ilmu Komunikasi Unhas, Dr. Muliadi Mau, meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa informasi yang dikecualikan harus melalui proses uji konsekuensi sebelum ditetapkan sebagai informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik.



Unhas Luncurkan KKN Tematik Keterbukaan Informasi Publik Pertama di Indonesia

Universitas Hasanuddin melaksanakan KKN Tematik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk memperluas pemahaman dan praktik keterbukaan informasi publik hingga pada tingkat desa dan kelurahan. Program ini merupakan bentuk inovasi pelaksanaan KKN yang secara khusus mengangkat isu keterbukaan informasi publik sebagai tema utama kegiatan mahasiswa.

KKN Tematik Keterbukaan Informasi Publik tersebut diluncurkan melalui Seminar Program Kerja Mahasiswa KKN Gelombang 116 yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pada 10 Juli 2026. Program ini dikembangkan sebagai KKN tematik pertama di Indonesia yang secara khusus berfokus pada keterbukaan informasi publik, dengan melibatkan mahasiswa dalam mendukung penguatan tata kelola informasi publik pada tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Fauziah Erwin, memberikan pembekalan mengenai keterbukaan informasi publik kepada mahasiswa KKN dan pihak terkait.

Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi, serta implementasi Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Kelurahan. Pembahasan juga mencakup kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi yang bersifat terbuka serta perlindungan terhadap informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan.



PPID Unhas melakukan Pembekalan Mahasiswa KKK Informasi Publik

PPID Universitas Hasanuddin memberikan pembekalan kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengenai Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas mahasiswa dalam mendukung transparansi serta pelayanan informasi publik di tingkat desa/kelurahan.

Dalam pembekalan tersebut, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai prinsip keterbukaan informasi publik, penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, serta peran mahasiswa dalam membantu pemerintah desa/kelurahan membangun sistem pelayanan informasi yang mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun materi pembekalan meliputi:

1. Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik, khususnya prinsip transparansi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
2. Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan, yaitu membantu perangkat desa/kelurahan dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.

3. Pengembangan Sarana Informasi Publik, melalui pemanfaatan media seperti situs web desa, media sosial, papan informasi, dan sarana diseminasi informasi lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan mendorong penyediaan informasi yang mudah diakses, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Pendampingan Pengelolaan Informasi di Desa/Kelurahan, termasuk membantu mengidentifikasi, mengelola, dan menyebarluaskan informasi publik yang relevan kepada masyarakat.



Seminar Hasil Akhir: Tandai Rampungnya 6 Program Kerja Unggulan

KKN Keterbukaan Informasi Publik Universitas Hasanuddin hadir membawa manfaat melalui berbagai program kerja yang diarahkan untuk **memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, serta mendukung transformasi pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan**. Enam program kerja yang dilaksanakan meliputi:

1. **Sosialisasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)**
Memberikan pemahaman kepada aparatur dan masyarakat mengenai mekanisme

pengelolaan informasi publik serta pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Pemanfaatan Instagram sebagai Sarana Keterbukaan Informasi

Mengoptimalkan media sosial resmi desa/kelurahan sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih cepat, mudah diakses, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

3. Pelatihan Pedoman Pemilihan Informasi PPID dan Copywriting

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengidentifikasi informasi yang perlu dipublikasikan serta menyusun materi komunikasi yang informatif, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.

4. Digitalisasi Pelayanan

Mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pelayanan publik sehingga tata kelola pelayanan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi.

5. Pembuatan Website Desa/Kelurahan

Menghadirkan platform informasi resmi yang menjadi pusat penyediaan data, berita, profil, serta informasi pelayanan desa/kelurahan yang dapat diakses oleh masyarakat.

6. Pembuatan Video Profil Desa/Kelurahan

Menyediakan media informasi visual yang menggambarkan kondisi, potensi, program, dan karakteristik wilayah sekaligus menjadi sarana publikasi dan dokumentasi desa/kelurahan.

Melalui enam program tersebut, KKN Keterbukaan Informasi Publik Unhas tidak hanya memberikan pembekalan kepada mahasiswa, tetapi juga menghadirkan pendampingan dan produk nyata yang dapat dimanfaatkan oleh desa dan kelurahan dalam memperkuat keterbukaan informasi, komunikasi publik, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



Workshop PPID Fakultas dan Keterbukaan Informasi Publik 2026

Workshop PPID Fakultas dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Universitas Hasanuddin dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan informasi publik pada tingkat fakultas. Kegiatan ini ditujukan kepada PPID Fakultas sebagai pelaksana yang memiliki peran dalam pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik di lingkungan masing-masing.

Pelaksanaan workshop menjadi sarana pembinaan dan penguatan pemahaman PPID Fakultas terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik. Selain itu, kegiatan ini digunakan sebagai forum koordinasi dan pengawasan untuk mengidentifikasi kebutuhan serta penguatan dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tingkat fakultas.

Kegiatan workshop menghadirkan materi yang berkaitan dengan pengelolaan dan keterbukaan informasi publik. Materi pertama disampaikan oleh Dr. Muliadi Mau, S.Sos., M.Si. yang membahas klasifikasi informasi publik.

Pembahasan materi meliputi pemahaman mengenai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat serta informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. PPID Fakultas diberikan pemahaman mengenai pentingnya melakukan identifikasi dan klasifikasi informasi secara tepat sebelum informasi tersebut disediakan atau diberikan

kepada pemohon informasi. Pembahasan juga menekankan bahwa pengelolaan informasi publik perlu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., selaku Kasubdit Hubungan Masyarakat, yang membahas pengelolaan layanan informasi publik dan peran PPID Fakultas dalam mendukung keterbukaan informasi di lingkungan Universitas Hasanuddin.

Dalam pembahasannya, disampaikan mengenai pentingnya koordinasi antara PPID Universitas dengan PPID Fakultas dalam penyediaan informasi publik. PPID Fakultas perlu memastikan bahwa informasi yang menjadi tanggung jawab unit kerja masing-masing tersedia, terdokumentasi, dan diperbarui secara berkala. Pengelolaan tersebut diperlukan untuk mendukung pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.